

Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman di Yogyakarta

Rosa Nikmatul Fajri
Universitas Alma Ata Yogyakarta
rosa.n@almaata.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 6 Januari 2022
Disetujui : 8 Februari 2022
Dipublikasi : 1 April 2022

ABSTRACT

In managing the MSME business, a good financial system is needed in terms of management and technology. Facts in the field on food and beverage MSMEs in Yogyakarta the management of the financial system still encounters problems, namely even though it is internet-based but in practice it still requires separate manual offline data backups in excel form. The purpose of this research is to design a unified MSME financial system improvement. Literacy studies are used to find common problems that exist. Qualitative research methods with a descriptive approach are used to determine the real conditions in the field. This study uses the method of observation and documentation. The primary data used is the existing online and offline system framework and the secondary data used is some supporting data obtained from MSMEs. From this research, various problems were found, namely a) food and beverage HPP is still in the form of estimates so that recorded profits are not accurate, b) employee salary calculations are not combined in one financial system, c) financial reports are difficult to understand, d) there is repetition of data recording between online and offline and e) BEP distribution does not project truth. The discussion of this study is the improvement of the financial system by integrating online and offline financial systems based on the Data Management Principles, namely integration and togetherness, accuracy, up-to-date and sustainability. Financial system improvement proposed so that MSMEs can contribute more to economic growth.

Keywords: MSME, Financial Sistem, Economic Growth, Fundamentals of Financial Data.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diberbagai wilayah Yogyakarta telah diatur oleh Undang-Undang, Kebijakan, dan Peraturan dalam perencanaan, pengelolaan, pengimplementasian dan pelaporan setiap kinerja baik segi non-keuangan maupun keuangan. Hal ini didukung data Siaran Pers dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bernomor HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 bahwa UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia karena kontribusi terhadap Product Domestic Bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Dan menurut Zhao & Collier (2017 dalam penelitian Alimuddin 2021) menyebutkan bahwa Era digital membawa perubahan dalam kewirausahaan. Perkembangan teknologi digital mengubah strategi bisnis tradisional. Kewirausahaan digital dipandang sebagai pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi oleh banyak negara.

Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Selain itu, kehadiran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah secara otomatis menjadi perhatian khusus dalam pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini, telah tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Koperasi dan UMKM Yogyakarta (2018) bahwa terjadi peningkatan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM pada akhir Bulan Desember 2018 adalah 10,676 milyar rupiah dari target 10,483 milyar rupiah atau 10,84%. Walaupun UMKM wilayah Yogyakarta mayoritas terjadi peningkatan omset, namun kondisi sistem keuangan UMKM masih terbilang memerlukan perbaikan secara komprehensif karena akan mempengaruhi signifikansi positif dari pertumbuhan ekonomi Wilayah Yogyakarta. Hal lain didukung oleh Hasil Evaluasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 – 2024 mengatakan bahwa UMKM di Indonesia memiliki beberapa masalah seperti pada bidang pemodal, operasional, teknis lapangan, terbatasnya akses pasar, organisasi, manajemen dan teknologi.

Agar keberadaan usaha UMKM tersebut dapat terus berlanjut dan berkembang dan dapat memberikan kontribusi lebih banyak pada pertumbuhan perekonomian maka diperlukan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan UMKM yang baik tersebut salah satunya di lihat dari pencatatan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang tepat, akurat, up-to-date dan mudah dipahami akan berperan dalam mengevaluasi UMKM tersebut agar dapat terus maju dan berkembang.

Dalam laporan keuangan UMKM makanan dan minuman telah menggunakan sistem pelaporan berbasis internet atau online tetapi tetap ada beberapa bagian pelaporan yang masih dicatat secara manual menggunakan sistem excel. Pada penggunaan dua metode pelaporan ditemui berbagai kendala yaitu pencatatan HPP makanan dan minuman masih menggunakan excel. Nilai HPP yang di masukkan juga sering tidak akurat karena hanya berupa estimasi. Hal ini mengakibatkan sistem menjadi tidak akurat dan penghitungan laba/rugi yang ada sering tidak sesuai. Perhitungan gaji pegawai juga tidak tergabungkan dalam satu sistem keuangan. Sering terjadi pengulangan pencatatan data antara online dan offline sehingga sistemnya menjadi tidak efektif. Karena perhitungan laba/rugi tidak akurat mengakibatkan penghitungan BEP juga menjadi tidak akurat. Laporan yang bertumpuk-tumpuk antara yang tertulis di online maupun offline mengakibatkan laporan keuangan menjadi sulit untuk dibaca.

Dari kendala-kendala diatas muncullah pertanyaan bagaimanakah sistem laporan keuangan yang lebih baik. Dari situlah maka peneliti merancang suatu sistem yang terpadu berupa pengintegrasian sistem online dan offline dengan memasukkan prinsip-prinsip pengelolaan data yang baik. Prinsip pengelolaan data yang baik ini berdasarkan asas keterpaduan dan kebersamaan, keakuratan, kemutakhiran dan keberlanjutan. Penerapan sistem keuangan baru yang lebih baik tersebut bertujuan agar UMKM dapat terus berkembang dan secara langsung dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan perekonomian.

Penelitian terdahulu mengenai pelaporan sistem keuangan menunjukkan beberapa hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Lakoro FS & Suroyanto (2021) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan sebelumnya masih berupa sistem manual. Pengembangan UMKM dilakukan dengan cara pengelolaan berbasis digital atau online yang diharapkan bisa membantu peningkatan perekonomian masyarakatnya. Penelitian oleh Fajar dan Larasati (2021) menyatakan bahwa penggunaan teknologi keuangan berbasis online (fintech) dapat memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam setiap kegiatan usaha dengan akses cepat. Penggunaan fintech juga dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan sehingga UMKM bisa lebih berkembang. Penelitian lain oleh Arifin dkk (2019) melakukan perbaikan terhadap sistem pelaporan keuangan yang semula berupa manual dengan cara merancang sistem keuangan secara online agar laporan yang dihasilkan bisa lebih akuntabel, cepat, akurat dan dapat dipahami. Penelitian oleh Rubhiyanti dkk (2020) menggunakan sistem informasi online berbasis multiuser untuk memperbaiki sistem sebelumnya yang masih berupa sistem manual. Sistem baru tersebut menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat.

Untuk menyediakan akomodasi lengkap dalam sistem keuangan UMKM ini diperlukan kerjasama dengan para ahli dan profesional bisnis yang memiliki keyakinan dan semangat yang sama dalam membantu dan mengembangkan UMKM.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti didalam menentukan topik dan permasalahan yang tengah dihadapi UMKM di Wilayah Indonesia pada umumnya dan pada khususnya UMKM yang berada di Wilayah Yogyakarta, sebagai berikut.

- a. Halim (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1 (2), 157 – 172

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antar variabel melalui data yang akurat serta terbaru sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan UMKM (X) memiliki nilai signifikan sebesar 1,97 dan Hubungan X dan Y dapat dilihat dari nilai pearson correlation yaitu sebesar 0,690 jika kita lihat dari pedoman derajat hubungan pearson correlation terletak pada bagian nomor 4 yaitu jika nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 berarti tingkat hubungan antara variabel X dan Variabel Y kolerasi kuat.

- b. Hermawan, S & Setyawati, Y. (2018). Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Penyusunan Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3 (2), 161 – 204

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Analisis yang digunakan triangulasi data dengan pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan kunci penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di wilayah Krian dan Pasuruan sebenarnya sudah membuat laporan keuangan ataupun catatan pembukuan walaupun terbilang sederhana dan pengetahuan akuntansi yang mereka miliki tergolong sederhana sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Namun demikian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih dirasa kesulitan untuk menyusun laporan keuangan mereka sebagaimana mestinya.

- c. Kusuma, M et all. (2022). Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM di Solo Raya. *Jurnal Among Makarti*, 14 (2), 62 – 76

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikan kuesioner kepada responden. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan memberikan pertimbangan berupa responden UMKM di Solo Raya yang sudah berdiri lebih dari satu tahun dan masih aktif menjalankan usaha. Teknik analisa data yang dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dan kinerja keuangan UMKM, serta literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Solo Raya. Sedangkan variabel literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha pada UMKM di Solo Raya.

- d. Lakoro FS & Suriyanto. (2021). Literasi dan Model Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Digital pada UMKM-UMKM di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5 (2), 45 - 55. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Boalemo mengalami masalah dalam menjalankan usahanya terutama pada masa pandemi disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah dalam membantu UMKM yang ada di Kabupaten Boalemo. Rata-rata UMKM di Kabupaten Boalemo dalam penggunaan literasi keuangan sepenuhnya paham dalam pengembangan UMKM berbasis digital terutama dalam meningkatkan pendapatan, bahkan tingkat pendidikan mereka dalam mengelola manajemen keuangan yang baik serta secara digital masih mengandalkan pencatatan secara manual. Sedangkan model manajemen keuangan UMKM berbasis digital belum sesuai dengan target dan tujuan. Hal ini dibuktikan pelaku usaha UMKM belum mampu membuat laporan keuangan. UMKM di Kabupaten Boalemo belum mampu menggunakan teknologi informasi dan media sosial terutama dalam memanfaatkan desain model manajemen keuangan yang berbasis digital. Disebabkan para UMKM hanya mengandalkan pencatatan secara manual.

- e. Pramudhiati, N et all. (2019) Penerapan SAK ETAP, Kinerja Usaha, dan Keberlanjutan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *AKUNTANSI DEWANTARA Journal UST*, 3 (2), 149 – 155

Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi pengaruh Standar Akuntansi Entitas Tidak Publik (SAK ETAP) terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMKM). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kinerja bisnis terhadap keberlanjutan UKM. Penelitian ini didasarkan pada data primer berupa kuesioner dengan menggunakan metode purposive sampling dan wawancara dengan narasumber terpilih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik UMKM dalam praktik pelaporan keuangan sesuai SAK ETAP untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usahanya. Penelitian ini menggambarkan hubungan antara penerapan SAK ETAP dengan keberlangsungan usaha UMKM sebagai variabel mediasi yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya.

- f. Prihatin dan Maruf (2019) Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan Perak di Kotagede Yogyakarta

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta. Variabel-variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, lama usaha, dan omzet penjualan per-bulan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta, berada pada kategori sedang. Variabel yang mempengaruhinya adalah: usia, tingkat pendidikan terakhir, lama usaha, dan omzet penjualan per-bulan berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan pelaku UMKM kerajinan perak di Kotagede Yogyakarta.

- g. Fajar dan Larasati (2021) Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia : Peluang dan Tantangan

Perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cukup pesat telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai sektor industri. Pengembangan potensi ekonomi secara strategis perlu dilakukan, salah satunya dengan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi dapat memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam setiap kegiatan usaha dengan akses cepat. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi dinamika perkembangan bisnis dewasa ini adalah Financial Technology (Fintech). Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Fintech dalam perkembangan UMKM di Indonesia disertai penjelasan mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian dan analisis deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh dari berbagai sumber referensi mengenai topik dan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur melalui berbagai jurnal penelitian, artikel, serta data sekunder. Penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan Fintech terhadap perkembangan UMKM dengan mengambil bahasan dari beberapa studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fintech memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Fintech dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Adapun penerapan Fintech dalam UMKM juga memiliki beberapa tantangan meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi pertama, menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rumah Belajar Bisnis (*home business camp*) pada Pasal 1 bahwa UMKM dijabarkan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Kecil.
3. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan UMK adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha perorangan dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Kecil.
4. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta sesuai Kartu Tanda Penduduk dan memiliki usaha mikro maupun kecil.

Definisi kedua, menurut peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor 82 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah daerah istimewa Yogyakarta, dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kemudian UMKM memiliki sistem pengelolaan yang kompleks. Sehingga membutuhkan sistem yang memadai didalam pengelolaan, pengimplementasian, evaluasi hingga pengelompokan data tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data UMKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, diseminasi, dan pengamanan data UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data UMKM menyebutkan bahwa Pengelolaan Data UMKM berasaskan:

- a. kebersamaan dan keterpaduan,
yaitu asas yang mendorong peran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Data UMKM untuk menghasilkan basis data terpadu;
- b. keakuratan,
yaitu asas yang mendasari kegiatan pengelolaan Data harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan Data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. kemuthakhiran,
yaitu asas yang menggambarkan perubahan Data menurut keadaan terbaru seiring perkembangan teknologi informasi;
- d. keberlanjutan,
yaitu asas yang secara terencana mengupayakan proses pendataan dan pengelolaan Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representatif.

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rumah Belajar Bisnis (*home business camp*), Pelaku UMKM adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta sesuai Kartu Tanda Penduduk dan memiliki usaha mikro maupun kecil.

Menurut Dimas (2019) bahwa kebijakan moneter yang selaras dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan membuat fungsi intermediasi lembaga keuangan tetap optimal. Tahun ini, Bank Indonesia masih mewaspadai kompleksitas ekonomi global yang berisiko terhadap fungsi intermediasi.

Sistem Keuangan

Setiap perusahaan atau kegiatan bisnis membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi data keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisikan mengenai informasi kinerja keuangan selama periode tertentu serta posisi kekayaan, hutang dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Informasi tersebut digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern, laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan bisnis berikutnya. Keputusan ini mencakup, misalnya pengembangan pasar, efisiensi biaya dan pembelian, menambah sarana produksi, dan lain-lain. Sedangkan bagi pihak ekstern, laporan keuangan digunakan salah satunya untuk menilai kelayakan usaha sebagai dasar pemberian kredit pinjaman modal untuk perusahaan (Sulistyowati, 2017).

Laporan keuangan sekarang ini diwajibkan untuk menggunakan sistem dimana dengan adanya sistem ini dapat mendukung kecepatan pemberian informasi yang akurat, relevan dan real time. Oleh

sebab itu, UMKM harus dapat menyesuaikan diri akan kebutuhan ini. Hal ini diungkapkan dalam Hermann, et al (2016 dalam penelitian Lakoro & Sukrianto, 2021) bahwa

- (a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat,
- (b) kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman,
- (c) meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin.

Pertumbuhan Ekonomi dari UMKM

Bappenas (2017 dalam Lakoro & Sukrianto, 2021) menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia karena terdapat tiga peran penting yang terkandung di dalamnya yaitu (1) Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan, (2) Sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil serta (3) memberikan pemasukan devisa bagi Negara.

Pembangunan ekonomi berbasis usaha mikro, kecil dan menengah menjadi industri kreatif dengan ide-ide inovatif potensial yang berkontribusi terhadap pembangunan produk barang dan jasa. Industri kreatif menawarkan jasa yang dapat digunakan sebagai input dari aktivitas inovatif perusahaan dan organisasi baik yang berada di dalam lingkungan industri kreatif maupun yang berada diluar industri kreatif. Industri kreatif juga menggunakan teknologi secara intensif sehingga dapat mendorong inovasi dalam bidang teknologi tersebut. Industri kreatif digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang penuh kreativitas (Halim, 2020).

Menurut Prihatin dan Maruf (2019) tentang Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan Perak di Kotagede Yogyakarta bahwa UMKM juga berpengaruh pada perekonomian daerah-daerah di Indonesia, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pada industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman, konstruksi, dan perdagangan adalah penyumbang terbesar *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Yogyakarta yang mencapainya 53,40%. Sehingga, keberlangsungan UMKM ini menjadi sangat penting bagi sektor perekonomian.

Menurut Ikhsan, dalam Raselawati (2011 dalam penelitian Saputri 2019) tentang analisis kontribusi usaha kecil menengah di kabupaten/kota provinsi daerah istimewa yogyakarta bahwa UKM memiliki peran penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Faktanya terdapat ketidakseimbangan antara sumbangan UKM dalam penyedia lapangan kerja dengan kontribusi dalam membentuk nilai tambah. Padahal, pertumbuhan UKM yang lebih cepat dibanding kelompok usaha besar akan mampu memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan.

Menurut Hamzah dan Agustien (2019) tentang pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor umkm di Indonesia bahwa adanya peningkatan jasa-jasa swasta diantaranya adalah kompleksitas kehidupan dapat memunculkan jenis jasa baru, peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi yang mempermudah aksesibilitas menghasilkan jasa-jasa baru. Jasa-jasa meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan untuk melayani kepentingan rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan lembaga-lembaga lain. Karakteristik usaha jasa secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu usaha jasa untuk memenuhi konsumsi dan usaha jasa untuk memenuhi kebutuhan usaha. Usaha jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti: usaha kuliner, usaha pengiriman barang, usaha transportasi, usaha penyedia layanan internet dan telekomunikasi.

Faktor Pendukung Pertumbuhan Ekonomi terhadap Sistem Keuangan

Faktor Pendukung pertumbuhan ekonomi terhadap sistem keuangan UMKM makanan dan minuman di Yogyakarta harus mengikuti “asas-asas dalam Pengelolaan Data keuangan UMKM dalam Pasal 4, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pengelolaan Data UMKM berasaskan:

- a. kebersamaan dan keterpaduan, yaitu asas yang mendorong peran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Data UMKM untuk menghasilkan basis data terpadu;
- b. keakuratan, yaitu asas yang mendasari kegiatan pengelolaan Data harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan Data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. kemuthakhiran, yaitu asas yang menggambarkan perubahan Data menurut keadaan terbaru seiring perkembangan teknologi informasi;
- d. keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan proses pendataan dan pengelolaan Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representative.

Selain harus mengikuti asas pengelolaan data atas UMKM ini, pelaku usaha wajib memperhatikan juga tentang kriteria data UMKM yang mempengaruhi perekonomian yang tertuang Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan indikator UMKM;
- b. lengkap dan akurat, yaitu data yang dikumpulkan harus lengkap, sesuai dengan format yang tersedia, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggung jawabkan;
- d. rapi, yaitu penyajian data yang dikumpulkan dibuat dalam bentuk tabel yang cara penulisan dan pengisian datanya sesuai dengan petunjuk pengisian; dan
- e. terpadu,

METODE

Penelitian ini awalnya dilakukan dengan model penelitian studi literasi didalam menemukan masalah secara umum yang tertuang dalam latar belakang. Menurut Handriani (2019) untuk mencari data pada studi literasi dapat merujuk buku-buku, jurnal-jurnal penelitian yang telah ter-publish baik lokal maupun internasional, tulisan-tulisan ilmiah, penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan artikel-artikel yang diterbitkan baik berupa majalah maupun surat kabar.

Kemudian, untuk menemukan sebuah masalah secara khusus yang dialami UMKM di Yogyakarta, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang langsung mengetahui situasi sesungguhnya di lapangan. Untuk mendukung hal tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan

1. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian (Rahardjo, 2011).

2. Studi Pustaka/ Dokumentasi

Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Rahardjo, 2011).

Dan data yang digunakan

1. Data primer berupa rerangka sistem keuangan *online* dan rerangka sistem keuangan *offline* berupa excel
2. Data sekunder data pendukung atau data penguat yang didapat dari sumber-sumber lain, yaitu tulisan, artikel atau makalah kepustakaan yang berkaitan dengan pengelolaan UMKM.

HASIL

Sistem Keuangan yang selama ini digunakan dalam merekap semua transaksi di UMKM makanan dan minuman di Yogyakarta sudah berbasis *online*. Akan tetapi juga masih menggunakan sistem keuangan secara *offline* sebagai pelengkap berupa excel. Dengan menggunakan sistem keuangan *online* dan *offline* berupa excel ini, ditemukan berbagai kendala-kedala.

Kendala yang pertama, hasil rekap HPP dari staf keuangan UMKM belum berdasarkan ketentuan HPP Makanan ataupun Minuman atau masih berupa estimasi sehingga tidak mencerminkan nilai HPP yang sebenarnya dan sementara ini nilai HPP masih disamakan dengan nilai pembelian. Hal ini sangat bertentangan dalam Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan. Dimana data tersebut harus lengkap, sesuai dengan format yang tersedia, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hal tersebut dapat terlihat dalam Tabel 4.1 HPP belum sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1 hasil rekap HPP dari staf keuangan UMKM yang belum berdasarkan ketentuan HPP Makanan ataupun Minuman (dalam bentuk excel)

Lapora Laba Rugi		
Makanan dan Minuman		
Juni 2021		
Penjualan		213.081.550
Rata-rata penjualan/ hari	6.873.598,39	
Pendapatan lain-lain	0	
		6.873.598,39 +
Total Penjualan		219.955.148,39
Persediaan awal	0	
Pembelian	64.132.366	
Persediaan akhir	0	
HPP		64.132.366 -
Laba Kotor		155.822.782,39

Sumber : dokumen atas pencatatan HPP pada UMKM tahun 2021

Padahal Harga Pokok Penjualan telah ditentukan sebelumnya oleh manajer operasional. HPP makanan tersebut tertuang dalam aplikasi excel yang dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 tentang ketentuan HPP makanan (dalam aplikasi Excel)

KATEGORI	MENU	HPP	PERKALIAN	TARGET HARGA JUAL	PEMBELANTAN / BENCANA HARGA BARU	HARGA AWAL	SEKELAH HARGA	% HPP BARU
APRINTHER	KOREAN CHICKEN WINGS	21.000	2,5	52.500	20.000	20.000	-	43,8%
	CHICKEN POPCORN	8.000	2,5	20.000	30.000	30.000	-	26,7%
	BALUSHTTA SAKON BEEF	9.500	2,5	23.750	30.000	30.000	-	30,8%
	FISH PLATTER	35.000	2,5	87.500	20.000	20.000	-	44,6%
	FISH FINGER	10.500	2,5	26.250	30.000	30.000	-	33,6%
SALAD	LAGIMAN SALAD	7.000	2,5	17.500	20.000	20.000	-	28,2%
	WYS SALAD	9.500	2,5	23.750	20.000	20.000	-	27,5%
	CHICKEN SALAD	6.000	2,5	15.000	20.000	20.000	-	24,0%
	TROPICAL SALAD	7.500	2,5	18.750	20.000	20.000	-	26,8%
SOUP	INDONESIAN CREAM SOUP	8.000	2,5	20.000	20.000	20.000	-	25,0%
	BROUO CREAM SOUP	9.500	2,5	23.750	20.000	20.000	-	26,0%
	CHICKEN SOUP	9.500	2,5	23.750	20.000	20.000	-	27,5%
	SUP BENCOP	28.000	2,5	70.000	30.000	30.000	-	44,3%
PASTA	SUP KIA	10.000	2,5	25.000	40.000	40.000	-	25,3%
	PAJLO OLOO	10.000	2,5	25.000	30.000	30.000	-	33,3%
	CARONANNA	11.500	2,5	28.750	20.000	30.000	-	38,3%
BAKAR	ROLODENSE	10.000	2,5	25.000	30.000	30.000	-	35,3%
	BLACKPEPPER	11.200	2,5	28.000	40.000	30.000	-	37,2%
	SIAM HENNES	9.750	2,5	24.375	20.000	20.000	-	34,6%
BAKAR	SIAM SERUNDENG	9.750	2,5	24.375	20.000	20.000	-	35,6%
	SIAM BAKAR MADU	9.750	2,5	24.375	20.000	30.000	-	35,6%
	SIAM KEMAH HEDAS	9.750	2,5	24.375	20.000	20.000	-	35,6%
	SIAM BAKAR	20.200	2,5	50.500	50.000	50.000	-	40,4%

Sumber : dokumen UMKM 2021

Padahal Harga Pokok Penjualan telah ditentukan sebelumnya oleh manajer operasional. HPP makanan tersebut tertuang dalam aplikasi excel yang dapat dilihat dalam Gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 tentang ketentuan HPP minuman (dalam aplikasi excel)

KATEGORI	MENU	HPP	PERKALIAN	TARGET HARGA JUAL	PEMBELANTAN / BENCANA HARGA BARU	HARGA AWAL	SEKELAH HARGA	% HPP BARU
SABUTAN	MANHATTAN SMOOTHIES	9.500	2,5	23.750	20.000	20.000	-	22,0%
	MANHATTAN MOKACAS	6.500	2,5	16.250	20.000	20.000	-	26,0%
	COOKIES FRAPPE	6.000	2,5	15.000	27.000	27.000	-	22,2%
	PASTRY ANGIE	9.000	2,5	22.500	30.000	30.000	-	24,0%
COFFEE	AMERICANO	9.000	2,5	22.500	20.000	20.000	-	15,6%
	CAFE LATTE	9.500	2,5	23.750	20.000	20.000	-	14,0%
	CAPPUCINO	9.500	2,5	23.750	20.000	20.000	-	14,0%
	ESPRESSO	9.000	2,5	22.500	20.000	20.000	-	17,1%
	MOCCHA LATTE	6.000	2,5	15.000	15.000	15.000	-	14,3%
	CARAMEL MANCHIATO	9.000	2,5	22.500	15.000	15.000	-	14,3%
	IRISH LATTE	6.000	2,5	15.000	17.000	17.000	-	12,2%
SNIKATATE	ICE COFFEE MANHATTAN	6.500	2,5	16.250	27.000	27.000	-	24,1%
	ICE COFFEE MEN	6.500	2,5	16.250	20.000	20.000	-	26,0%
	ICE COFFEE FRAPPE	6.500	2,5	16.250	27.000	27.000	-	24,1%
	ICE COFFEE KLEPON	6.500	2,5	16.250	20.000	20.000	-	26,0%
	ICE COFFEE STRAWBERRY	7.000	2,5	17.500	20.000	20.000	-	23,4%
	ICE COFFEE BUTTERSCOTCH	6.500	2,5	16.250	20.000	20.000	-	26,0%
SNIKATATE	CHOCOLATE CHOCOL	9.000	2,5	22.500	30.000	30.000	-	18,7%
	CHOCOL BROS	9.500	2,5	23.750	20.000	20.000	-	15,7%
	CHOCOL AVOCADO	6.500	2,5	16.250	20.000	30.000	-	16,7%
	CHOCOL COOKIES	9.000	2,5	22.500	20.000	20.000	-	18,1%

Sumber : dokumen UMKM 2021

Kendala yang kedua, jika dilihat dari segi lain terutama dalam perhitungan gaji karyawan di UMKM makanan dan minuman di Yogyakarta ini masih tergolong rendah karena hanya mencatatnya didalam sistem keuangan excel yang tidak semua stakeholder dapat membaca kecuali mendapatkan tautan dokumen tersebut dari bagian keuangan UMKM. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 4, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pengelolaan Data UMKM diwajibkan untuk mengadopsi asas keberlanjutan yang mengatur tentang pengupayaan dalam proses pendataan dan pengelolaan Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representatif.

Berikut Gambar 4.3 yang menggambarkan sistem pencatata gaji yang tidak tergabung menjadi satu di sistem keuangan *online*.

Gambar 4.3 Tentang Gaji (dalam bentuk excel)

Sumber : dokumen atas pencatatan Gaji pada UMKM tahun 2021

Hal ini berdampak pada pencatatan atas laporan keuangan 1) hanya tertuang dalam akun beban dan pendapatan saja yang disajikan dalam bentuk excel sehingga berdampak pada informasi yang tersaji disana kurang dapat dipahami oleh publik/ *stakeholder*. Hal ini cukup bertentangan dengan Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

- a. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggung jawabkan;
- b. rapi, yaitu penyajian data yang dikumpulkan dibuat dalam bentuk tabel yang cara penulisan dan pengisian datanya sesuai dengan petunjuk pengisian.

Dan 2) laporan keuangan hanya dicatat dalam sistem keuangan offline berupa excel dan tidak terintegrasi dengan sistem online yang berjalan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.4.

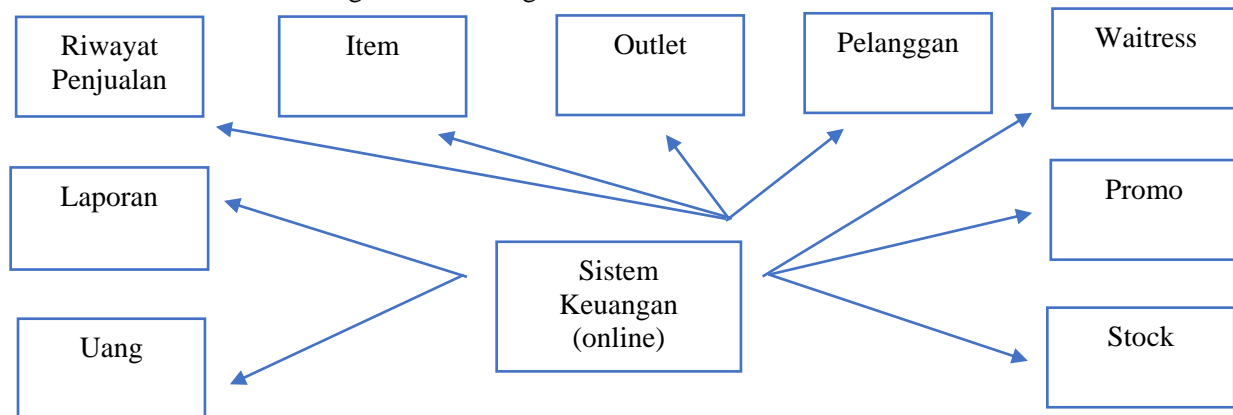
Gambar 4.4 tentang Laporan Keuangan (dalam bentuk excel)

LAPORAN LABA RUGI MANHATTAN CAFE JULI 2021		PERSENTASE / PENGULANGAN
PENJUALAN		
Rata-rata penjualan/Puan	Rp. 4.623.580,65	
PENDAPATAN DI LUAR COFFEESHOP	Rp. 600.000	0,42%
PERSEDIAAN AWAL	Rp. 248.351.000	
PEMBELIAN	Rp. 53.770.290	
PERSEDIAAN AKHIR		
RAK	Rp. 53.770.290	37,87%
LABA KOTOR	Rp. 89.560.710	
BIAYA-BIAYA		
BIAYA PERLENGKAPAN OFFICE	Rp. 381.000	0,27%
BIAYA GAK	Rp. 32.716.000	22,83%
BIAYA INTERNET	Rp. 619.500	0,43%
BIAYA KEBERSIHAN	Rp. 2.582.600	1,80%
BIAYA LAHU-LAHU	Rp. 1.059.900	0,74%
BIAYA PERLENGKAPAN OPERASIONAL	Rp. 3.157.100	2,29%
BIAYA PENGEMBANGAN INVESTASI	Rp. 6.238.200	4,53%
BIAYA PENYEMBAHAN	Rp. 45.000	0,03%
BIAYA MANNETING	Rp. 1.105.000	0,77%
BIAYA TRANSPORTASI	Rp. 195.500	0,14%
BIAYA LISTRIK	Rp. 3.700.000	2,60%
Biaya administrasi	Rp. 355.610	0,25%
BIAYA BONGKAR PAKSIAN	Rp.	
Jumlah BIAYA	Rp. 52.155.410	36,39%
LABA BERSIH sebelum pajak	Rp. 37.405.300	26,10%
Pajak ppn final	Rp.	
Labu ditahan	Rp.	
LABA BERSIH setelah pajak	Rp. 37.405.300	26,10%

Sumber : dokumen atas pencatatan laporan keuangan pada UMKM tahun 2021

Hal ini cukup bertentangan dengan Pasal 4, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa pengelolaan Data UMKM wajib berasaskan kebersamaan dan keterpaduan, yaitu asas yang pengelolaan Data UMKM untuk menghasilkan basis data terpadu.

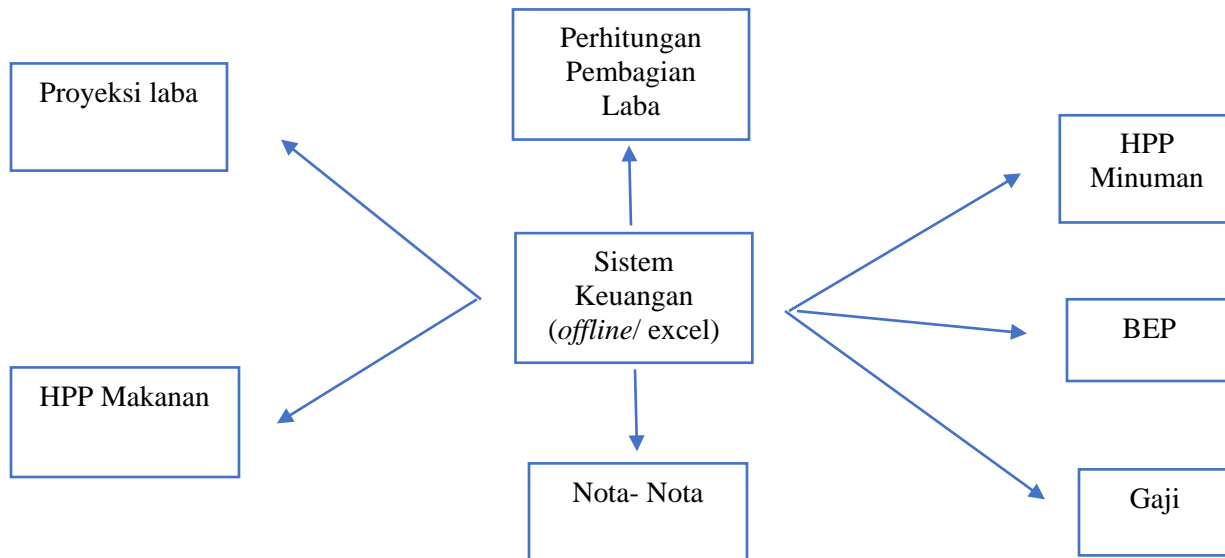
Kendala yang ketiga, sistem keuangan melupakan asas keterpaduan antara sistem keuangan online dengan offline, sehingga kerja keuangan ini akan terjadi pengulangan dalam pencatatan. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.5 tentang sistem keuangan online.



Gambar 4.5 tentang sistem keuangan online

Sumber: Diolah sendiri (ringkasan)

Kemudian sistem keuangan *offline* berupa excel dimana tidak terintegrasi dalam sistem keuangan *online* yang terdapat pada Gambar 4.1 diatas, dapat dilihat dalam Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 tentang sistem keuangan berupa excel
 Sumber: Diolah sendiri (ringkasan)

Kendala yang keempat, pembagian Break Even Point (BEP) tidak memproyeksikan yang sebenarnya dan masih menggunakan sistem keuangan excel atau tidak teritegrasi dengan sistem keuangan online. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 4.7 tentang BEP.

Gambar 4.7 tentang BEP

bukti penerimaan profit share			
bulan	Jun-21		
LABA BERSIH	Rp	111.598.000	
investor	70%	Rp78.118.600	
operator	30%	Rp33.479.400	
investor	operator		

Sumber : dokumen atas pembagian BEP UMKM tahun 2021

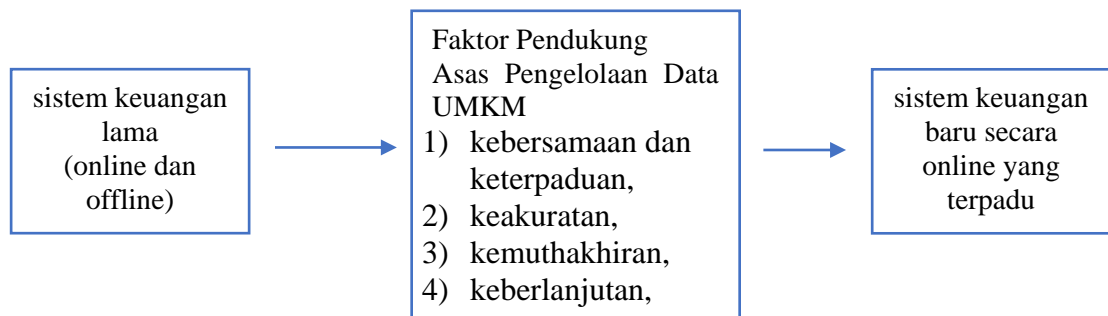
Sehingga saran yang dilakukan untuk menanggulangi atau mengeliminasi kendala-kendala yang ada di sistem keuangan lama yaitu

1. Memperbaiki sistem keuangan yang ada dengan memasukkan faktor pendukung berupa Asas Pengelolaan Data UMKM
2. Menggabungkan sistem keuangan *online* dengan sistem keuangan *offline* berupa excel ke dalam sistem keuangan baru secara online yang terpadu

PEMBAHASAN

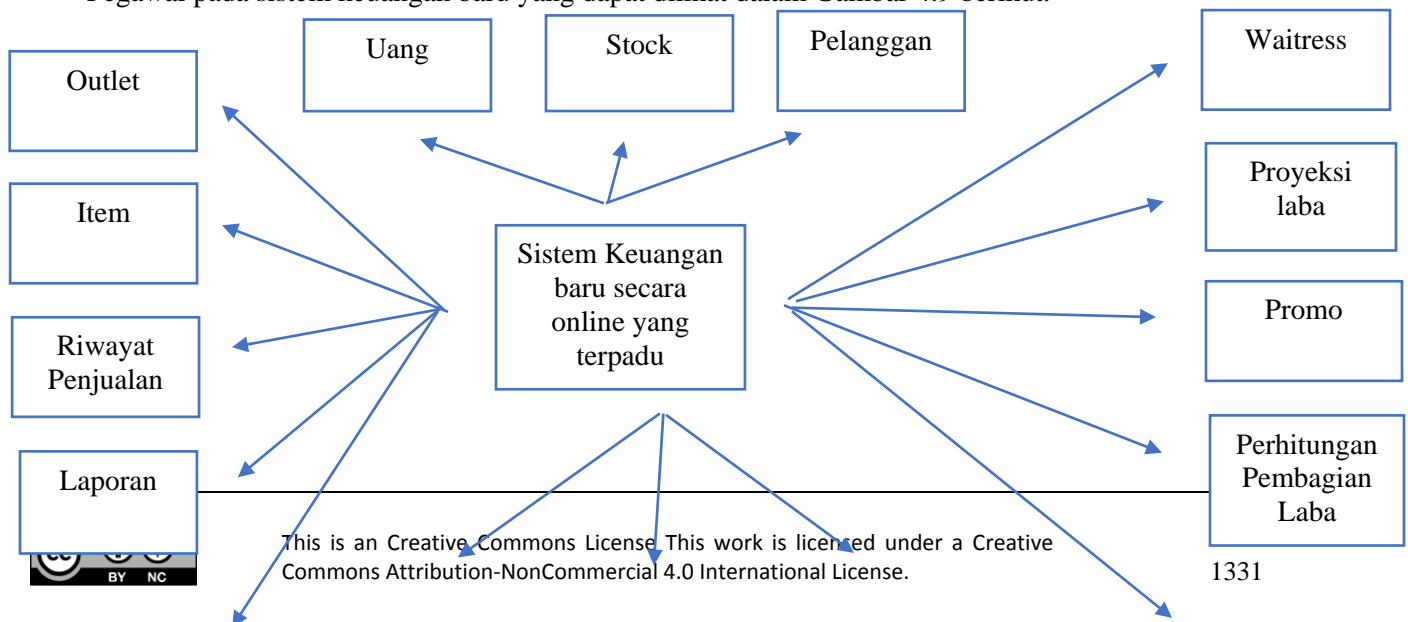
Demi memfasilitasi saran sistem keuangan ini bisa berjalan baik dan dapat menjaga kestabilan dari keuangan UMKM makanan dan minuman sehingga berdampak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi ini, maka peneliti membuat sistem keuangan baru dengan rancangan atau menggabungkan sistem online dan offline dalam satu sistem sesuai dengan anjuran yang tertuang dalam Pasal 4, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwujudan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah

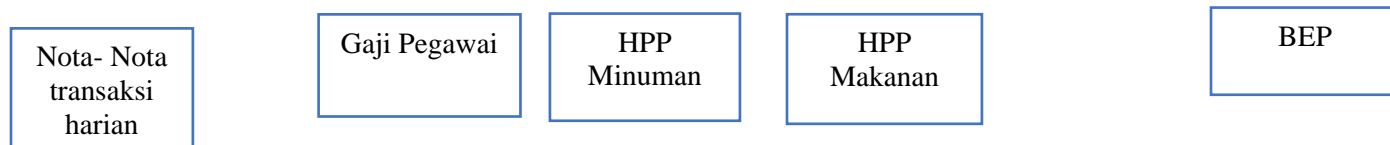
- 1) Memperbaiki sistem keuangan yang ada dengan memasukkan faktor pendukung berupa Asas Pengelolaan Data UMKM yang dapat dilihat dalam Gambar 4.8 berikut.



Gambar 4.8 Perbaikan Sistem Ditambah dengan Asas Pengelolaan Data UMKM
 Sumber: Diolah sendiri

2. Menggabungkan sistem keuangan *online* dengan sistem keuangan *offline* berupa excel ke dalam sistem keuangan baru secara online yang terpadu dengan menambah menu baru yaitu 1) Proyeksi laba; 2) perhitungan pembagian laba; 3) Harga Pokok Penjualan (HPP) Makanan; 4) Harga Pokok Penjualan Minuman; 5) Nota-Nota Transaksi harian; 6) Break Even Point (VEP) dan 7) Gaji Pegawai pada sistem keuangan baru yang dapat dilihat dalam Gambar 4.9 berikut.





Gambar 4.9 : Sistem Keuangan Baru UMKM Makanan dan Minuman Yogyakarta
Sumber: Diolah sendiri

Pembahasan kali ini, yang dievaluasi dalam ketercapaian sistem keuangan baru atas faktor pendukung berupa asas-asas pengelolaan data keuangan UMKM makanan dan minuman di Yogyakarta yang tertuang dalam Pasal 4, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini hasil analisis dari observasi dan dokumentasi yang ada di lapangan.

1. keterpaduan, dan kebersamaan

Setelah adanya perubahan atau rekonstruksi sistem keuangan UMUM makanan dan minuman ini dengan menggabungkan sistem lama berupa online dan offline menjadi satu kesatuan, maka berdasarkan survey lapangan dan hasil observasi, UMKM ini telah mencantumkan asas keterpaduan dalam sistem keuangan. Dimana jika terdapat keterpaduan berdasarkan asas maka secara otomatis menciptakan kebersamaan atau kesolidan data keuangan yang disajikan.

2. keakuratan,

Setelah adanya perubahan atau rekonstruksi sistem keuangan UMUM makanan dan minuman ini dengan menggabungkan sistem lama berupa online dan offline menjadi satu kesatuan, maka berdasarkan survey lapangan dan hasil observasi, UMKM ini telah menyajikan

- a. HPP baik makanan maupun minuman bukan estimasi (dalam sistem keuangan online) tetapi berdasarkan perhitungan matang yang telah disahkan oleh manajemen sebelumnya, sehingga laba yang tercatat dalam sistem keuangan tergambar sebagaimana mestinya
- b. Jika point a terpenuhi : HPP bukan estimasi dan laba memproyeksikan yang sebenarnya maka Laporan Keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh publik
- c. Perhitungan gaji karyawan tergabung dalam satu sistem keuangan maka pencatatan gaji atas karyawan dapat dipastikan telah berdasarkan perhitungan matang yang telah disahkan oleh manajemen sebelumnya dan telah disesuaikan UMK Wilayah Yogyakarta.

3. kemutakhiran,

kemutakhiran sistem keuangan baru yang menggabungkan sistem keuangan online dan offline berupa excel telah dilakukan, maka dengan sistem keuangan ini dapat memberikan kontribusi pengurangan pengeluaran input data keuangan.

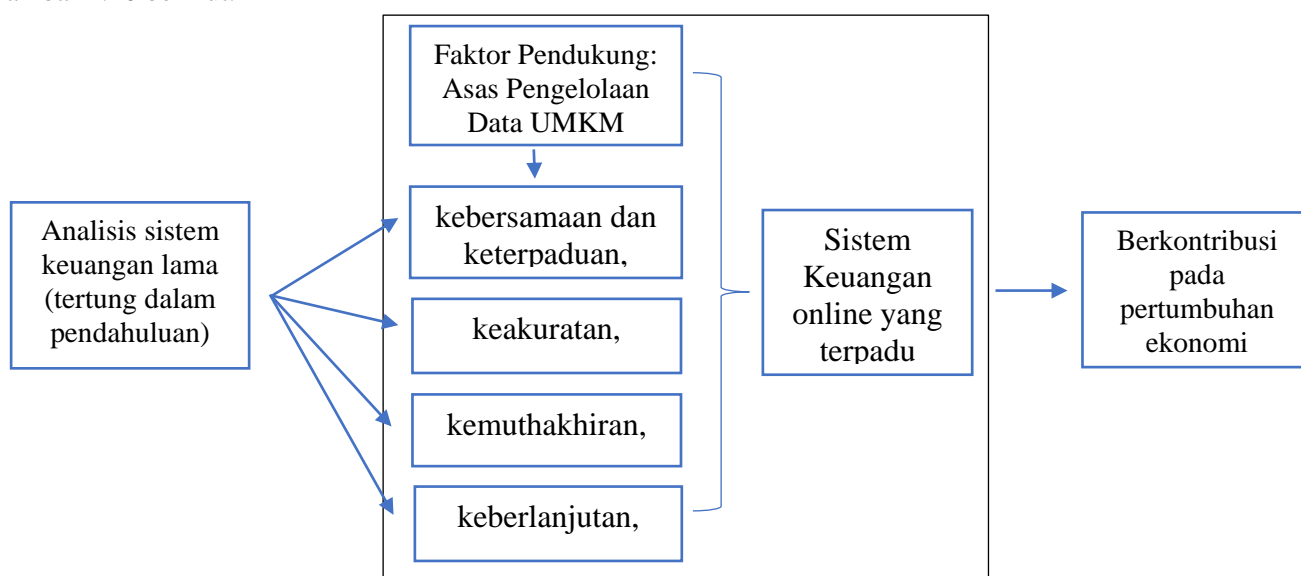
4. keberlanjutan

Setelah adanya perubahan atau rekonstruksi sistem keuangan UMUM makanan dan minuman ini dengan menggabungkan sistem lama berupa online dan offline menjadi satu kesatuan, maka berdasarkan survei lapangan dan hasil observasi, UMKM ini telah tercapainya *Break Event Point* (BEP) yang dimaksudkan dan bukan berupa estimasi.

Jika asas keterpaduan dan kebersamaan, keakuratan, kemutakhiran dan keberlanjutan terpenuhi dan tercapai dengan adanya sistem keuangan baru yang diterapkan maka secara langsung berkontribusi pada spesifik, lengkap dan akurat, akuntabel, rapi, dan terpadu yang tertuang pada Pasal 6 dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, kriteria data yang wajib dipenuhi UMKM.

Hal ini sesuai dengan Data Dinas Koperasi dan UKM DIY menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi sebesar 95% dari perekonomian DIY. Selain itu, usaha mikro memberi kontribusi sebesar 55%, usaha kecil sebesar 25%, dan usaha menengah sebesar 15%. Serta UMKM dianggap sebagai tulang punggung dari sistem ekonomi suatu negara dalam menghasilkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberikan kontribusi bagi produk domestik bruto (Gray and Jones, 2016 dan Bianchi et.al, 2017 dalam penelitian Pramudyati et all, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas sistem keuangan UMKM agar sistem tersebut dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai pendapat dari Navastara (2014) mengemukakan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang dapat mencoba dan merumuskan kelembagaan-kelembagaan daerah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk - produk unggulan yang lebih baik, pencarian pasar, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan industri kecil dan kegiatan usaha pada skala lokal. Dapat terlihat dalam Gambar 4.10 berikut.



Gambar 4.10: Hasil Evaluasi: Terpenuhi dan Tercapai Pemenuhan Asas Pengelolaan Data Keuangan
Sumber: Diolah sendiri

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis diatas diketahui bahwa pengembangan sistem keuangan pada UMKM sangat diperlukan. Sistem sebelumnya yang masih terbagi dua antara online dan offline menimbulkan berbagai kendala seperti ketidak akuratan data, terjadinya banyak pengulangan input, sistem penggajian yang tidak tepat dan kesulitan pada waktu penghitungan BEP. Hal ini mengakibatkan UMKM sulit berkembang sehingga menghambat pertumbuhannya. Sistem Keuangan yang baru dibuat dalam bentuk penggabungan sistem online dan offline dan dengan penambahan faktor pendukung berupa Prinsip Pengelolaan Data yaitu keterpaduan dan kebersamaan, keakuratan, kemutakhiran dan keberlanjutan. Evaluasi yang dilakukan atas sistem baru menunjukkan bahwa sistem telah berhasil menerapkan Prinsip Pengelolaan data yang baik sehingga menghasilkan laporan baik. Perbitungan laba UMKM bisa tercatat dengan tepat, perhitungan gaji menjadi lebih jelas sesuai dengan keuangan UMKM, perhitungan BEP menjadi lebih akurat dan sistem keuangan akan lebih mudah untuk dibaca dan

dievaluasi kedepannya. Diharapkan dengan sistem keuangan yang lebih baik tersebut keberlanjutan usaha UMKM akan terus berjalan dan mampu berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Alimuddin. (2021). Penggunaan Internet dan Peluang Berwirausaha di Indonesia. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, 26 (2), 112 – 121. <https://doi.org/10.20961/jkb.v26i2.50913>
- Andriyani dan Astuti. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Inni Dawet Cincu Desa Sumengko Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial*, 5 (1), 52 – 68.
- Arifin dkk. (2019). Perancangan Laporan Keuangan Berbasis Online dalam Rangka Peningkatan Usaha Tahu Goreng di Wilayah Sumedang Jawa Barat. *FAIRVALUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1 (2), 209 – 222. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v1i2.12>
- Dimas, WN. (2019). Retrieved March3, 2022. Kebijakan Moneter akan Jaga Stabilitas Sistem Keuangan, From <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/03/kebijakan-moneter-akan-jaga-stabilitas-sistem-keuangan>
- Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (2018). Indonesia.
- Fadillah et all. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *BERNAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (6), 892 – 896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Fajar dan Larasati. (2021). Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Humanities, Management and Science Proceedings*, 1(2), 702 – 715. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH/article/download/11835/7250>
- Gunanto. (2015). Peranan Laporan Keuangan dalam Rangka Memberdayakan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16(1), 103 – 112. <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v16i01.25>
- Halim, Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1 (2), 157 – 172.
- Hamzah dan Agustien. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 (2), 127 – 135. <http://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hidayat, A. (2021). Governance dan Stabilitas Sistem Keuangan. Indonesia Banking School. Retrieved from <http://ibs.ac.id/governance-dan-stabilitas-sistem-keuangan/>
- Hermawan, S & Setyawati, Y. (2018). Persepsi Pemilik dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atas Penyusunan Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3 (2), 161 – 204.
- Kusuma, M et all. (2022). Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM di Solo Raya. *Jurnal Among Makarti*, 14 (2), 62 – 76.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. SIARAN PERS HM.4.6/103/SET.M.EKON.3/05/2021 tentang UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia (2021). Indonesia.
- Lakoro FS & Suriyanto. (2021). Literasi dan Model Manajemen Keuangan UMKM Berbasis Digital pada UMKM-UMKM di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5 (2), 45 - 55. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>
- Pramudhiati, N et all. (2019) Penerapan SAK ETAP, Kinerja Usaha, dan Keberlanjutan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *AKUNTANSI DEWANTARA Journal UST*, 3 (2), 149 – 155.
- Prihatin dan Maruf. (2019). Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kerajinan Perak di Kotagede Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 3(1), 1 – 10. <https://doi.org/10.18196/jerss.030101>

- Rahardjo, M. (2011). Retrieved March 3, 2022. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif (Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs. UIN Maliki Malang), from <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>
- Rifa'I, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *HUMAN FALAH*, 4 (2), 193 – 217.
- Rubhiyanti dkk. (2020). Rancang Bangun Sistem Penjualan Tunai dan Penerimaan Kas Berbasis Multiuser. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13 (2), 58 – 66.
- Rudiantoro, R & Siregar SV. (2012). Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (1), 1 – 21. <http://dx.doi.org/10.21002/jaki.2012.01>
- Republik Indonesia. Peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 82 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan data usaha mikro, kecil, dan menengah daerah istimewa yogyakarta (2019). Indonesia.
- Republik Indonesia. Peraturan walikota Yogyakarta nomor 33 tahun 2019 tentang rumah belajar bisnis (home business camp) (2019). Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang – undang republik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (2008). Indonesia.
- Saputri. (2019). Analisis Kontribusi Usaha Kecil Menengah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved from <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5503/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=13&isAllowed=y>
- Sulistiyowati, Y. (2017). Pencatatan Pelaporan Keuangan UMKM (Study Kasus di Kota Malang). *REFERENSI: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 5 (2), 49 – 55.
- Sumantri, BA & Permana, EPP. (2017). Manajemen Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Retrieved from [http://repository.unpkediri.ac.id/154/2/A.%20Buku%20Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.pdf](http://repository.unpkediri.ac.id/154/2/A.%20Buku%20Manajemen%20Koperasi%20dan%20Usaha%20Mikro%20Kecil.pdf)
- Winarsih et all. (2021). The Relationship between Capital Financial, Accounting Capability and Micro-, Small- and Medium-Sized Enterprises' (MSMEs) Financial Performance in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 8 (2), 229 – 242.
- Wulansari dkk. (2018). Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Sinergi UMKM dan Good Governance di Indonesia. *UNEJ E-Proceeding*, 262 – 268. Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6719/4875>
- Yuliawan & Wanniatie. (2021). Analisis Covid-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 10 (3), 144 – 158 <https://doi.org/10.23960/jep.v10i3.300>